



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1905, 2016

KEMENDAGRI. Pelimpahan. Penugasan. Urusan  
Pemerintahan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN  
URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2016 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, terdapat penyesuaian lokasi dan alokasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016;

- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan penyesuaian Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 untuk masing-masing Provinsi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
  3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035), terkait dengan penyesuaian Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 untuk masing-masing Provinsi, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2016

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I				
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA				
NOMOR 99 TAHUN 2016				
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM				
NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN				
PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENDAGRI				
TAHUN ANGGARAN 2016				
PENYESUAIAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI				
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016				
UNTUK MASING-MASING PROVINSI				
NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)		KOMPONEN PEMBINA
		SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5
1.	PROVINSI ACEH	Rp 22,334,547,500	Rp 6,103,115,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 715,000,000	Rp 272,443,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan			
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 175,000,000	Rp 57,879,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 17,338,790,500	Rp 1,870,135,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 737,116,000	Rp 534,017,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Ketentraman,			
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 2,095,341,000	Rp 2,095,341,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 673,300,000	Rp 673,300,000	
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	Rp 39,817,583,000	Rp 9,353,003,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 655,000,000	Rp 222,598,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan			
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 250,000,000	Rp 74,076,000	

	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi pengembangan kapasitas			
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 30,905,334,000	Rp 1,754,779,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 678,466,000	Rp 422,767,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 805,000,000	Rp 355,000,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 555,000,000	Rp 555,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 5,356,213,000	Rp 5,356,213,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 612,570,000	Rp 612,570,000	
3	PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp 12,480,386,500	Rp 5,151,553,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 655,000,000	Rp 220,298,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan			
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 490,000,000	Rp 292,342,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 8,269,840,500	Rp 2,320,250,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 654,633,000	Rp 400,346,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 492,596,000	Rp -	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,369,917,000	Rp 1,369,917,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 548,400,000	Rp 548,400,000	
4.	PROVINSI RIAU	Rp 20,168,694,000	Rp 5,565,649,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 638,000,000	Rp 206,532,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			

	a)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 15,064,850,000	Rp 1,366,460,000	
	c.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a)	Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 650,202,000	Rp 453,165,000	
	b)	Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 302,958,000	Rp 226,808,000	
	2)	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan			
	a)	Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 500,000,000	Rp 300,000,000	
	3)	Kegiatan Pembinaan Ketentraman,			
	a)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	
	4)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a)	Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 360,000,000	Rp 360,000,000	
	d.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1)	Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a)	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,875,464,000	Rp 1,875,464,000	
	e.	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 477,220,000	Rp 477,220,000	
5		PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 6,379,492,000	Rp 3,308,841,000	
	a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 680,000,000	Rp 222,112,000	
	b.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1)	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1,665,323,000	Rp -	
	c.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a)	Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 692,806,000	Rp 503,634,000	
	b)	Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 346,248,000	Rp 346,248,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a)	Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 558,268,000	Rp -	
	3)	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan			
	a)	Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 500,000,000	Rp 300,000,000	
	4)	Kegiatan Pembinaan Ketentraman,			
	a)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	
	d.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1)	Kegiatan Pengembangan Sistem			

	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,133,917,000	Rp 1,133,917,000	
e.	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 502,930,000	Rp 502,930,000	
6	PROVINSI JAMBI	Rp 18,937,423,000	Rp 3,221,154,000	
a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 650,000,000	Rp 215,070,000	
b.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 15,068,150,000	Rp -	
c.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 599,294,000	Rp 386,105,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 545,000,000	Rp 545,000,000	
d.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,610,769,000	Rp 1,610,769,000	
e.	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 464,210,000	Rp 464,210,000	
7	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rp 24,331,036,000	Rp 5,044,897,000	
a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 657,000,000	Rp 228,322,000	
b.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 17,997,320,000	Rp -	
c.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 616,232,000	Rp 483,686,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 1,392,595,000	Rp 665,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman,			
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000	
d.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 2,841,169,000	Rp 2,841,169,000	
e.	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 426,720,000	Rp 426,720,000	
8.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	Rp 6,789,483,000	Rp 2,768,639,000	
a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			



	a)	Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 670,000,000	Rp 220,586,000	
	b.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1)	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 3,673,334,000	Rp 600,805,000	
	c.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a)	Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 645,953,000	Rp 417,224,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a)	Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 270,172,000	Rp -	
	3)	Kegiatan Pembinaan Ketentraman,			
	a)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000	
	d.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			DITJEN DUKCAPIL
	1)	Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a)	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 679,754,000	Rp 679,754,000	
	e.	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM			DITJEN POLPUM
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 500,270,000	Rp 500,270,000	
9		PROVINSI BENGKULU	<u>Rp 16,577,510,000</u>	<u>Rp 4,828,855,000</u>	
	a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 675,000,000	Rp 247,515,000	
	2)	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan			
	a)	Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 250,000,000	Rp 71,637,000	
	b.	PROGRAM BINA PEMERINTAH DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1)	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 12,272,760,000	Rp 1,763,383,000	
	c.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a)	Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 725,605,000	Rp 655,243,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a)	Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 906,068,000	Rp 343,000,000	
	d.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1)	Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a)	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,216,677,000	Rp 1,216,677,000	
	e.	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM			DITJEN POLPUM
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 531,400,000	Rp 531,400,000	
10.		PROVINSI LAMPUNG	<u>Rp 35,542,080,000</u>	<u>Rp 11,323,787,000</u>	
	a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 650,000,000	Rp 241,727,000	

	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan				
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 240,000,000	Rp 78,691,000		
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas				
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 27,844,505,000	Rp 4,560,890,000		
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat				
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 800,264,000	Rp 435,168,000		
	2) Kegiatan Pembinaan Ketentraman,				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000		
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI				DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 5,162,661,000	Rp 5,162,661,000		
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN				DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan				
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 494,650,000	Rp 494,650,000		
11.	PROVINSI BANTEN	Rp 21,736,886,000	Rp 5,613,843,000		
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 682,000,000	Rp 86,960,000		
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas				
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 17,700,930,000	Rp 3,165,460,000		
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat				
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 549,845,000	Rp 330,940,000		
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,				
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 685,628,000	Rp -		
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan				
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	Rp 212,000,000		
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI				DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,462,383,000	Rp 1,462,383,000		
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM				DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan				
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 356,100,000	Rp 356,100,000		
12.	PROVINSI DKI JAKARTA	Rp 1,660,091,000	Rp 1,396,799,000		
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat				
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 505,610,000	Rp 242,318,000		
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI				DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 818,911,000	Rp 818,911,000		
	c. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN				DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan				
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 335,570,000	Rp 335,570,000		

13.	PROVINSI JAWA BARAT	Rp 38,171,003,000	Rp 6,563,191,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 700,000,000	Rp 238,205,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan			
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 470,000,000	Rp 285,264,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 30,431,790,000	Rp -	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 703,951,000	Rp 564,850,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 319,920,000	Rp 319,920,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 636,780,000	Rp 246,390,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 4,371,212,000	Rp 4,371,212,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 537,350,000	Rp 537,350,000	
14	PROVINSI JAWA TENGAH	Rp 30,422,443,000	Rp 7,603,394,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 697,000,000	Rp 266,563,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan			
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 490,000,000	Rp 125,576,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA DESA
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 22,260,390,000	Rp 1,964,040,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 706,902,000	Rp -	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 756,936,000		
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman,			
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	Rp 240,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 585,000,000	Rp 481,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 3,896,565,000	Rp 3,896,565,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			

		a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 629,650,000	Rp 629,650,000	
15	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		Rp 8,264,836,000	Rp 2,204,827,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan				
		a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 665,000,000	Rp 252,825,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan				
		a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 400,000,000	Rp 121,301,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas				
		a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 4,652,668,000	Rp -	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat				
		a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 690,541,000	Rp 421,198,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,				
		a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 273,859,000	Rp -	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman,				
		a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	Rp 219,735,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan				
		a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	Rp 207,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem				
		a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 577,008,000	Rp 577,008,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM				DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan				
		a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 405,760,000	Rp 405,760,000	
16.	PROVINSI JAWA TIMUR		Rp 31,028,694,000	Rp 7,014,180,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan				
		a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 685,000,000	Rp 238,332,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan				
		a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 480,000,000	Rp 112,100,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas				
		a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 22,138,396,000	Rp -	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat				
		a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 578,475,000	Rp 402,101,000	
		b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 315,676,000	Rp -	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,				

	a)	Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 669,500,000	Rp 185,000,000	
	3)	Kegiatan Pembinaan Ketentraman,			
	a)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000	
	4)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a)	Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	Rp 215,000,000	
	d.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1)	Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a)	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 4,849,347,000	Rp 4,849,347,000	
	e.	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 662,300,000	Rp 662,300,000	
17.		PROVINSI BALI	<u>Rp 6,301,427,000</u>	<u>Rp 3,393,358,000</u>	
	a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 810,000,000	Rp 277,738,000	
	2)	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan			
	a)	Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 250,000,000	Rp 68,554,000	
	b.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1)	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1,897,080,000	Rp -	
	c.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a)	Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 766,376,000	Rp 564,172,000	
	b)	Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 304,492,000	Rp 304,492,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a)	Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	Rp 154,923,000	
	3)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a)	Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	
	d.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			DITJEN DUKCAPIL
	1)	Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a)	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,343,069,000	Rp 1,343,069,000	
	e.	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM			DITJEN POLPUM
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 380,410,000	Rp 380,410,000	
18		PROVINSI KALIMANTAN BARAT	<u>Rp 25,844,525,000</u>	<u>Rp 5,418,970,000</u>	
	a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 667,000,000	Rp 226,050,000	
	b.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1)	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 19,131,514,000	Rp -	
	c.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			

	a)	Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 606,707,000	Rp 522,480,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a)	Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 816,864,000	Rp 283,000,000	
	3)	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan			
	a)	Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 500,000,000	Rp 325,000,000	
	4)	Kegiatan Pembinaan Ketentraman,			
	a)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	Rp 340,000,000	
	5)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a)	Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 340,000,000	Rp 340,000,000	
d.		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			DITJEN DUKCAPIL
	1)	Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a)	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 2,885,250,000	Rp 2,885,250,000	
e.		PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM			DITJEN POLPUM
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 497,190,000	Rp 497,190,000	
19		PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Rp 14,056,156,000	Rp 6,463,173,000	
	a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 698,000,000	Rp 229,606,000	
	b.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1)	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 9,651,030,000	Rp 2,773,420,000	
	c.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a)	Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 651,300,000	Rp 404,321,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a)	Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	
	3)	Kegiatan Pembinaan Ketentraman,			
	a)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000	
	d.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			DITJEN DUKCAPIL
	1)	Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a)	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,908,206,000	Rp 1,908,206,000	
	e.	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 497,620,000	Rp 497,620,000	
20		PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Rp 20,721,151,000	Rp 3,119,995,000	

	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 705,000,000	Rp 261,780,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAH DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1) kegiatan fasilitasi pengembangan kpasitas			
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 16,482,490,000	Rp -	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 554,727,000	Rp 403,101,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 303,935,000	Rp 303,935,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 624,820,000	Rp 183,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman,			
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	Rp 218,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 962,059,000	Rp 962,059,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 488,120,000	Rp 488,120,000	
21.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Rp 13,332,973,000	Rp 5,020,548,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 700,000,000	Rp 250,003,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 9,723,260,000	Rp 2,177,300,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 532,629,000	Rp 388,282,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 258,237,000	Rp 171,116,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a) Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	Rp 215,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,234,387,000	Rp 1,234,387,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			

		a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 384,460,000	Rp 384,460,000	
22	PROVINSI SULAWESI UTARA		Rp 22,705,622,000	Rp 9,049,608,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan				
		a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 721,000,000	Rp 300,403,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas				
		a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 17,726,820,000	Rp 4,882,750,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat				
		a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 776,918,000	Rp 485,571,000	
		b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 299,552,000	Rp 299,552,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,				
		a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan				
		a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 400,000,000	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem				
		a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,969,332,000	Rp 1,969,332,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM				DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan				
		a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 512,000,000	Rp 512,000,000	
23	PROVINSI GORONTALO		Rp 10,898,846,000	Rp 5,376,547,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan				
		a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 683,000,000	Rp 220,451,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan				
		a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 425,000,000	Rp 254,228,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas				
		a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 7,729,550,000	Rp 3,066,110,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat				
		a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 671,998,000	Rp 446,460,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,				
		a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000	



	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 714,738,000	Rp 714,738,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 424,560,000	Rp 424,560,000	
24.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp 25,574,681,000	Rp 4,174,753,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 683,000,000	Rp 273,612,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan			
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 330,000,000	Rp 122,462,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 21,337,400,000	Rp 910,340,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 688,461,000	Rp 451,855,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	Rp 180,664,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,688,480,000	Rp 1,688,480,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 547,340,000	Rp 547,340,000	
25.	PROVINSI SULAWESI BARAT	Rp 11,685,174,000	Rp 4,270,818,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 670,000,000	Rp 238,679,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan			
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 250,000,000	Rp 101,181,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 6,926,844,000	Rp 739,154,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 815,086,000	Rp 455,868,000	
	b) Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 225,281,000	Rp 225,281,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 537,308,000	Rp 250,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman,			

	a)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	
	d.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1)	Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a)	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,546,265,000	Rp 1,546,265,000	
	e.	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN			DITJEN POLPUM
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 414,390,000	Rp 414,390,000	
26		PROVINSI SULAWESI TENGGARA	<u>Rp 26,543,790,000</u>	<u>Rp 3,384,868,000</u>	
	a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 678,000,000	Rp 221,436,000	
	2)	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan			
	a)	Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 260,000,000	Rp -	
	b.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1)	kegiatan fasilitasi pengembangan kapasitas			
	a)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 21,357,942,000	Rp -	
	c.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a)	Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 686,333,000	Rp 437,773,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a)	Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 860,856,000	Rp 185,000,000	
	3)	Kegiatan Pembinaan Ketentraman,			
	a)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	Rp 240,000,000	
	d.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			DITJEN DUKCAPIL
	1)	Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a)	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,819,899,000	Rp 1,819,899,000	
	e.	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM			DITJEN POLPUM
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 480,760,000	Rp 480,760,000	
27		PROVINSI SULAWESI SELATAN	<u>Rp 15,778,681,000</u>	<u>Rp 9,963,739,000</u>	
	a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 770,000,000	Rp 244,896,000	
	2)	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan			
	a)	Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 490,000,000	Rp 215,160,000	
	b.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1)	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 8,219,100,000	Rp 3,941,835,000	
	c.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a)	Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 765,690,000	Rp 525,957,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			

	a)	Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	Rp 182,000,000	
	3)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a)	Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 960,000,000	Rp 580,000,000	
	d.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			DITJEN DUKCAPIL
	1)	Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a)	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 3,747,461,000	Rp 3,747,461,000	
	e.	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM			DITJEN POLPUM
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 526,430,000	Rp 526,430,000	
28		PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Rp 16,030,596,000	Rp 9,420,653,000	
	a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 750,000,000	Rp 239,589,000	
	b.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1)	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 10,178,376,000	Rp 4,591,966,000	
	c.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a)	Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 783,953,000	Rp 541,645,000	
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a)	Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	Rp 139,186,000	
	3)	Kegiatan Pembinaan Ketentraman,			
	a)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	Rp 240,000,000	
	4)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a)	Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	
	d.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			DITJEN DUKCAPIL
	1)	Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a)	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 2,910,847,000	Rp 2,910,847,000	
	e.	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM			DITJEN POLPUM
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 457,420,000	Rp 457,420,000	
29		PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 33,099,703,000	Rp 8,020,152,000	
	a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a)	Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 750,000,000	Rp 255,459,000	
	b.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1)	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 25,975,370,000	Rp 1,774,365,000	
	c.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a)	Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 763,322,000	Rp 705,824,000	
	b)	Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah	Rp 323,701,000	Rp 216,128,000	

	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,				
	a)	Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	Rp 164,066,000		
	3)	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan				
	a)	Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000		
	4)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan				
	a)	Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	Rp 217,000,000		
	d.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				DITJEN DUKCAPIL
	1)	Kegiatan Pengembangan Sistem				
	a)	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 3,536,620,000	Rp 3,536,620,000		
	e.	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM				DITJEN POLPUM
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan				
	a)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 650,690,000	Rp 650,690,000		
30		PROVINSI MALUKU	Rp 21,490,125,000	Rp 8,164,333,000		
	a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				DITJEN BINA BANGDA
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan				
	a)	Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 732,000,000	Rp 25,633,000		
	b.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				DITJEN BINA PEMDES
	1)	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas				
	a)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 16,550,395,000	Rp 4,143,646,000		
	c.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				DITJEN BINA ADWIL
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat				
	a)	Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 735,514,000	Rp 522,838,000		
	2)	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,				
	a)	Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000		
	3)	Kegiatan Pembinaan Ketentraman,				
	a)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000		
	d.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				DITJEN DUKCAPIL
	1)	Kegiatan Pengembangan Sistem				
	a)	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 2,317,826,000	Rp 2,317,826,000		
	e.	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM				DITJEN POLPUM
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan				
	a)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 554,390,000	Rp 554,390,000		
31		PROVINSI MALUKU UTARA	Rp 17,379,191,000	Rp 3,232,588,000		
	a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				DITJEN BINA BANGDA
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan				
	a)	Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 670,000,000	Rp 247,308,000		
	b.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				DITJEN BINA PEMDES
	1)	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas				
	a)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 12,994,193,000	Rp -		

	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 848,539,000	Rp 564,709,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 568,514,000	Rp 122,626,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 1,765,565,000	Rp 1,765,565,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 532,380,000	Rp 532,380,000	
32	PROVINSI PAPUA	<u>Rp 29,960,813,000</u>	<u>Rp 15,320,014,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 794,000,000	Rp 76,416,000	
	b) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 250,000,000	Rp -	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 21,201,390,000	Rp 8,297,975,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 583,170,000	Rp 173,762,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 350,000,000	Rp 189,608,000	
	3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan			
	a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 500,000,000	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 5,692,093,000	Rp 5,692,093,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 590,160,000	Rp 590,160,000	
33	PROVINSI PAPUA BARAT	<u>Rp 25,209,952,000</u>	<u>Rp 5,491,169,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 750,000,000	Rp 81,893,000	

	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 20,371,680,000	Rp 2,052,680,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 606,912,000	Rp 189,922,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 350,000,000	Rp 195,314,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman,			
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	Rp 240,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 2,314,980,000	Rp 2,314,980,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 416,380,000	Rp 416,380,000	
34	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rp 8,740,604,000	Rp 2,212,455,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 695,000,000	Rp 198,960,000	
	b. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA			DITJEN BINA PEMDES
	1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas			
	a) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 5,261,185,000	Rp -	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat			
	a) Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 626,470,000	Rp 402,782,000	
	2) Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi,			
	a) Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 499,236,000	Rp 152,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan			
	a) Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara Di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan & PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama Di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG Dan RI-RDTL	Rp 500,000,000	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 671,813,000	Rp 671,813,000	
	e. PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM			DITJEN POLPUM
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan			
	a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Fasilitasi FORKOMPIMDA	Rp 486,900,000	Rp 486,900,000	
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,				
TJAHJO KUMOLO				

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENDAGRI TAHUN ANGGARAN 2016				
PENYESUAIAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016 UNTUK MASING-MASING PROVINSI				
NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)		KOMPONEN PEMBINA
		SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5
1.	PROVINSI ACEH	<u>Rp24,858,226,000</u>	<u>Rp23,517,436,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN			DITJEN BINA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis			
	- Kab. Pidie Jaya	Rp 1,500,000,000	Rp 1,378,024,000	
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Aceh Barat	Rp 860,898,000	Rp 806,878,000	
	- Kab. Aceh Barat Daya	Rp 720,401,000	Rp 675,203,000	
	- Kab. Aceh Besar	Rp 1,164,645,000	Rp 1,091,575,000	
	- Kab. Aceh Jaya	Rp 658,469,000	Rp 617,157,000	
	- Kab. Aceh Selatan	Rp 899,717,000	Rp 843,269,000	
	- Kab. Aceh Singkil	Rp 731,242,000	Rp 685,364,000	
	- Kab. Aceh Tamiang	Rp 907,854,000	Rp 846,953,000	
	- Kab. Aceh Tengah	Rp 819,168,000	Rp 767,773,000	
	- Kab. Aceh Tenggara	Rp 864,927,000	Rp 806,977,000	
	- Kab. Aceh Timur	Rp 1,239,124,000	Rp 1,160,984,000	
	- Kab. Aceh Utara	Rp 1,442,156,000	Rp 1,351,656,000	
	- Kab. Bener Meriah	Rp 743,279,000	Rp 689,677,000	
	- Kab. Bireuen	Rp 1,146,382,000	Rp 1,073,997,000	
	- Kab. Gayo Lues	Rp 697,680,000	Rp 653,908,000	
	- Kab. Nagan Raya	Rp 756,157,000	Rp 708,716,000	
	- Kab. Pidie	Rp 1,023,698,000	Rp 958,698,000	
	- Kab. Pidie Jaya	Rp 691,450,000	Rp 648,050,000	
	- Kab. Simeulue	Rp 676,767,000	Rp 634,297,000	
	- Kota Banda Aceh	Rp 749,096,000	Rp 702,081,000	
	- Kota Langsa	Rp 652,841,000	Rp 611,882,000	
	- Kota Lhoksumawe	Rp 646,416,000	Rp 605,373,000	
	- Kota Sabang	Rp 473,496,000	Rp 443,746,000	
	- Kota Subulussalam	Rp 592,363,000	Rp 555,198,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a) Pembangunan Sarpras dalam			
	- Kab. Aceh Tamiang	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000	
	- Kab. Bener Meriah	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000	
	- Kab. Pidie Jaya	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000	
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	<u>Rp35,335,623,000</u>	<u>Rp32,983,034,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN			DITJEN BINA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis			

	- Kab. Tapanuli Tengah	Rp 590,000,000	Rp 197,594,000	
b.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
1)	Kegiatan Pengembangan Sistem			
a)	Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Asahan	Rp 1,551,231,000	Rp 1,453,907,000	
	- Kab. Batu Bara	Rp 872,550,000	Rp 817,806,000	
	- Kab. Dairi	Rp 940,407,000	Rp 881,406,000	
	- Kab. Deli Serdang	Rp 2,549,791,000	Rp 2,399,091,000	
	- Kab. Humbang Hasundutan	Rp 758,189,000	Rp 758,189,000	
	- Kab. Karo	Rp 1,080,801,000	Rp 1,014,043,000	
	- Kab. Labuan Batu	Rp 1,038,842,000	Rp 968,042,000	
	- Kab. Labuan Batu Selatan	Rp 772,097,000	Rp 723,597,000	
	- Kab. Labuan Batu Utara	Rp 923,699,000	Rp 865,746,000	
	- Kab. Langkat	Rp 1,783,175,000	Rp 1,670,809,000	
	- Kab. Mandailing Natal	Rp 1,256,894,000	Rp 1,178,036,000	
	- Kab. Nias	Rp 716,853,000	Rp 671,853,000	
	- Kab. Nias Barat	Rp 625,646,000	Rp 583,046,000	
	- Kab. Nias Selatan	Rp 1,258,986,000	Rp 1,179,997,000	
	- Kab. Nias Utara	Rp 724,403,000	Rp 678,403,000	
	- Kab. Padang Lawas	Rp 853,720,000	Rp 799,720,000	
	- Kab. Padang Lawas Utara	Rp 826,886,000	Rp 774,886,000	
	- Kab. Pakpak Bharat	Rp 582,190,000	Rp 545,663,000	
	- Kab. Samosir	Rp 693,365,000	Rp 649,863,000	
	- Kab. Serdang Bedagai	Rp 1,320,954,000	Rp 1,238,634,000	
	- Kab. Simalungun	Rp 1,922,417,000	Rp 1,801,805,000	
	- Kab. Tapanuli Selatan	Rp 933,128,000	Rp 874,128,000	
	- Kab. Tapanuli Tengah	Rp 1,084,293,000	Rp 1,016,264,000	
	- Kab. Tapanuli Utara	Rp 953,586,000	Rp 953,586,000	
	- Kab. Toba Samosir	Rp 839,897,000	Rp 839,897,000	
	- Kota Binjai	Rp 739,949,000	Rp 691,249,000	
	- Kota Gunungsitoli	Rp 618,348,000	Rp 573,848,000	
	- Kota Medan	Rp 3,177,820,000	Rp 3,051,320,000	
	- Kota Padang Sidempuan	Rp 705,885,000	Rp 661,385,000	
	- Kota Pematang Siantar	Rp 792,785,000	Rp 742,385,000	
	- Kota Sibolga	Rp 544,126,000	Rp 508,626,000	
	- Kota Tanjung Balai	Rp 668,578,000	Rp 624,078,000	
	- Kota Tebing Tinggi	Rp 634,132,000	Rp 594,132,000	
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp 19,123,646,000	Rp 16,429,757,000	
a.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN			DITJEN BINA
1)	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan			
a)	Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis			
	- Kab. Lima Puluh Kota	Rp 580,000,000	Rp 443,334,000	
	- Kab. Padang Pariaman	Rp 160,000,000	Rp -	
	- Kab. Solok	Rp 1,176,044,000	Rp 442,067,000	
	- Kab. Solok Selatan	Rp 550,341,000	Rp 241,727,000	
	- Kab. Tanah Datar	Rp 760,000,000	Rp 310,854,000	
b.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
1)	Kegiatan Pengembangan Sistem			
a)	Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Agam	Rp 1,198,374,000	Rp 1,134,239,000	
	- Kab. Dharmasraya	Rp 792,166,000	Rp 742,246,000	
	- Kab. Kepulauan Mentawai	Rp 682,449,000	Rp 639,149,000	
	- Kab. Lima Puluh Kota	Rp 1,001,078,000	Rp 938,270,000	
	- Kab. Padang Pariaman	Rp 1,149,710,000	Rp 1,077,577,000	



	- Kab. Pasaman	Rp 882,375,000	Rp 827,014,000	
	- Kab. Pasaman Barat	Rp 1,027,962,000	Rp 963,468,000	
	- Kab. Pesisir Selatan	Rp 1,140,141,000	Rp 1,066,341,000	
	- Kab. Sawahluntoh/Sijunjung	Rp 776,810,000	Rp 761,646,000	
	- Kab. Solok	Rp 1,021,196,000	Rp 957,196,000	
	- Kab. Solok Selatan	Rp 705,569,000	Rp 661,302,000	
	- Kab. Tanah Datar	Rp 803,283,000	Rp 752,821,000	
	- Kota Bukittinggi	Rp 550,926,000	Rp 514,626,000	
	- Kota Padang	Rp 1,411,676,000	Rp 1,367,676,000	
	- Kota Padang Panjang	Rp 506,686,000	Rp 473,886,000	
	- Kota Pariaman	Rp 573,236,000	Rp 537,253,000	
	- Kota Payakumbuh	Rp 629,380,000	Rp 589,847,000	
	- Kota. Sawahlunto	Rp 571,011,000	Rp 535,185,000	
	- Kota Solok	Rp 473,233,000	Rp 452,033,000	
4.	PROVINSI RIAU	Rp 14,852,344,000	Rp 14,105,773,000	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Bengkalis	Rp 1,079,459,000	Rp 1,011,459,000	
	- Kab. Indragiri Hilir	Rp 1,347,316,000	Rp 1,347,316,000	
	- Kab. Indragiri Hulu	Rp 1,042,428,000	Rp 979,628,000	
	- Kab. Kampar	Rp 1,475,964,000	Rp 1,387,346,000	
	- Kab. Kepulauan Meranti	Rp 857,586,000	Rp 803,586,000	
	- Kab. Kuantan Singingi	Rp 977,917,000	Rp 914,917,000	
	- Kab. Pelalawan	Rp 968,069,000	Rp 907,332,000	
	- Kab. Rokan Hilir	Rp 1,287,046,000	Rp 1,205,962,000	
	- Kab. Rokan Hulu	Rp 1,232,916,000	Rp 1,164,916,000	
	- Kab. Siak	Rp 1,052,956,000	Rp 986,893,000	
	- Kota Dumai	Rp 730,285,000	Rp 684,466,000	
	- Kota Pekanbaru	Rp 1,400,402,000	Rp 1,311,952,000	
	b. PROGRAM BINA ADMINISTRASI			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a) Pembangunan Sarpras dalam			
	- Kab. Siak	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000	
5.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 10,848,192,000	Rp 7,738,905,000	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Bintan	Rp 696,353,000	Rp 653,353,000	
	- Kab. Karimun	Rp 851,884,000	Rp 798,884,000	
	- Kab. Kep. Anambas	Rp 553,286,000	Rp 519,286,000	
	- Kab. Lingga	Rp 661,124,000	Rp 619,344,000	
	- Kab. Natuna	Rp 688,144,000	Rp 644,144,000	
	- Kota Batam	Rp 1,581,576,000	Rp 1,497,976,000	
	- Kota Tanjung Pinang	Rp 615,825,000	Rp 577,425,000	
	b. PROGRAM BINA ADMINISTRASI			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan			
	a) Pengadaan Sarana Prasarana			
	- Kab. Bintan	Rp 1,600,000,000	Rp 1,600,000,000	
	- Kab. Karimun	Rp 1,800,000,000	Rp 34,010,000	
	- Kab. Natuna	Rp 1,800,000,000	Rp 794,483,000	

6.	PROVINSI JAMBI	Rp 9,802,311,000	Rp 9,179,905,000	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Batang Hari	Rp 843,944,000	Rp 797,144,000	
	- Kab. Tanjung Jabung Barat	Rp 872,204,000	Rp 816,154,000	
	- Kab. Bungo	Rp 929,136,000	Rp 870,842,000	
	- Kab. Sarolangun	Rp 829,393,000	Rp 777,357,000	
	- Kab. Kerinci	Rp 890,697,000	Rp 834,797,000	
	- Kab. Merangin	Rp 1,119,086,000	Rp 1,048,996,000	
	- Kab. Tanjung Jabung Timur	Rp 798,004,000	Rp 747,804,000	
	- Kab. Tebo	Rp 922,120,000	Rp 850,620,000	
	- Kab. Muaro Jambi	Rp 940,163,000	Rp 881,563,000	
	- Kota Jambi	Rp 1,082,884,000	Rp 1,016,084,000	
	- Kota Sungai Penuh	Rp 574,680,000	Rp 538,544,000	
7.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rp 18,357,966,000	Rp 17,217,341,000	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Banyuasin	Rp 1,511,274,000	Rp 1,416,874,000	
	- Kab. Empat Lawang	Rp 847,261,000	Rp 793,261,000	
	- Kab. Lahat	Rp 1,043,066,000	Rp 974,566,000	
	- Kab. Muara Enim	Rp 1,288,582,000	Rp 1,207,152,000	
	- Kab. Musi Banyuasin	Rp 1,194,692,000	Rp 1,135,692,000	
	- Kab. Musi Rawas	Rp 1,041,370,000	Rp 975,370,000	
	- Kab. Musi Rawas Utara	Rp 708,206,000	Rp 664,126,000	
	- Kab. Ogan Ilir	Rp 1,097,613,000	Rp 1,028,673,000	
	- Kab. Ogan Komering Ilir	Rp 1,415,742,000	Rp 1,325,742,000	
	- Kab. Ogan Komering Ulu	Rp 906,280,000	Rp 849,080,000	
	- Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Rp 1,120,505,000	Rp 1,052,125,000	
	- Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Rp 1,354,359,000	Rp 1,269,386,000	
	- Kab. Panukal Abab Lematang Ilir	Rp 651,490,000	Rp 609,918,000	
	- Kota Lubuk Linggau	Rp 696,364,000	Rp 652,674,000	
	- Kota Pagar Alam	Rp 621,940,000	Rp 582,940,000	
	- Kota Palembang	Rp 2,170,543,000	Rp 2,034,363,000	
	- Kota Prabumulih	Rp 688,679,000	Rp 645,399,000	
8.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	Rp 4,727,110,000	Rp 4,429,479,000	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Bangka	Rp 840,352,000	Rp 787,409,000	
	- Kab. Bangka Barat	Rp 677,981,000	Rp 635,444,000	
	- Kab. Bangka Selatan	Rp 690,502,000	Rp 647,162,000	
	- Kab. Bangka Tengah	Rp 662,408,000	Rp 620,260,000	
	- Kab. Belitung	Rp 578,197,000	Rp 541,897,000	
	- Kab. Belitung Timur	Rp 623,143,000	Rp 583,943,000	
	- Kota Pangkal Pinang	Rp 654,527,000	Rp 613,364,000	

9.	PROVINSI BENGKULU	Rp 8,438,305,000	Rp 7,618,076,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN			DITJEN BINA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis			
	- Kab. Lebong	Rp 510,000,000	Rp 208,148,000	
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Bengkulu Selatan	Rp 708,799,000	Rp 664,799,000	
	- Kab. Bengkulu Tengah	Rp 675,594,000	Rp 633,594,000	
	- Kab. Bengkulu Utara	Rp 954,977,000	Rp 894,977,000	
	- Kab. Kaur	Rp 768,587,000	Rp 715,587,000	
	- Kab. Kepahiang	Rp 731,410,000	Rp 685,521,000	
	- Kab. Lebong	Rp 733,411,000	Rp 686,411,000	
	- Kab. Muko-Muko	Rp 783,673,000	Rp 734,505,000	
	- Kab. Rejang Lebong	Rp 884,084,000	Rp 813,084,000	
	- Kab. Seluma	Rp 834,720,000	Rp 782,120,000	
	- Kota Bengkulu	Rp 853,050,000	Rp 799,330,000	
10.	PROVINSI LAMPUNG	Rp 19,272,083,000	Rp 17,846,754,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN			DITJEN BINA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis			
	- Kab. Lampung Barat	Rp 375,000,000	Rp 133,632,000	
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Lampung Barat	Rp 876,551,000	Rp 816,671,000	
	- Kab. Lampung Selatan	Rp 1,936,634,000	Rp 1,815,119,000	
	- Kab. Lampung Tengah	Rp 2,301,428,000	Rp 2,156,628,000	
	- Kab. Lampung Timur	Rp 1,885,933,000	Rp 1,768,933,000	
	- Kab. Lampung Utara	Rp 1,593,270,000	Rp 1,494,166,000	
	- Kab. Mesuji	Rp 826,460,000	Rp 774,620,000	
	- Kab. Pesawaran	Rp 1,092,629,000	Rp 1,023,775,000	
	- Kab. Pesisir Barat	Rp 720,531,000	Rp 676,531,000	
	- Kab. Pringsewu	Rp 958,409,000	Rp 898,279,000	
	- Kab. Tanggamus	Rp 1,353,529,000	Rp 1,268,609,000	
	- Kab. Tulang Bawang	Rp 1,068,482,000	Rp 1,001,482,000	
	- Kab. Tulang Bawang Barat	Rp 776,628,000	Rp 727,828,000	
	- Kab. Way Kanan	Rp 1,102,145,000	Rp 1,036,935,000	
	- Kota Bandar Lampung	Rp 1,820,960,000	Rp 1,706,660,000	
	- Kota Metro	Rp 583,494,000	Rp 546,886,000	
11.	PROVINSI BANTEN	Rp 15,092,018,000	Rp 13,926,195,000	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Lebak	Rp 1,924,177,000	Rp 1,803,577,000	
	- Kab. Pandeglang	Rp 2,038,144,000	Rp 1,910,271,000	
	- Kab. Serang	Rp 2,184,863,000	Rp 2,047,784,000	
	- Kab. Tangerang	Rp 3,306,754,000	Rp 3,099,554,000	
	- Kota Cilegon	Rp 836,002,000	Rp 781,602,000	
	- Kota Serang	Rp 1,030,290,000	Rp 965,649,000	
	- Kota Tangerang	Rp 2,095,916,000	Rp 1,747,786,000	
	- Kota Tangerang Selatan	Rp 1,675,872,000	Rp 1,569,972,000	

12.	PROVINSI DKI JAKARTA	Rp 16,655,736,000	Rp 15,733,636,000	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Rp 472,760,000	Rp 442,660,000	
	- Kota Adm. Jakarta Barat	Rp 3,529,357,000	Rp 3,331,557,000	
	- Kota Adm. Jakarta Pusat	Rp 2,230,398,000	Rp 2,110,298,000	
	- Kota Adm. Jakarta Selatan	Rp 3,572,487,000	Rp 3,350,787,000	
	- Kota Adm. Jakarta Timur	Rp 4,310,495,000	Rp 4,082,995,000	
	- Kota Adm. Jakarta Utara	Rp 2,540,239,000	Rp 2,415,339,000	
13.	PROVINSI JAWA BARAT	Rp67,630,709,000	Rp60,134,789,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN			DITJEN BINA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis			
	- Kab. Bandung	Rp 300,000,000	Rp 221,766,000	
	- Kab. Cianjur	Rp 1,070,000,000	Rp 344,876,000	
	- Kab. Cirebon	Rp 720,000,000	Rp 288,625,000	
	- Kab. Indramayu	Rp 920,000,000	Rp 637,188,000	
	- Kab. Kuningan	Rp 1,700,000,000	Rp 597,331,000	
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI		Rp -	DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Bandung	Rp 2,388,794,000	Rp 2,230,157,000	
	- Kab. Bandung Barat	Rp 3,104,728,000	Rp 2,909,728,000	
	- Kab. Bekasi	Rp 4,569,104,000	Rp 4,282,439,000	
	- Kab. Bogor	Rp 4,482,217,000	Rp 4,284,717,000	
	- Kab. Ciamis	Rp 2,001,466,000	Rp 1,875,466,000	
	- Kab. Cianjur	Rp 3,078,464,000	Rp 2,885,004,000	
	- Kab. Cirebon	Rp 3,050,422,000	Rp 2,858,454,000	
	- Kab. Garut	Rp 3,176,869,000	Rp 2,970,369,000	
	- Kab. Indramayu	Rp 2,684,146,000	Rp 2,515,742,000	
	- Kab. Karawang	Rp 2,711,199,000	Rp 2,540,539,000	
	- Kab. Kuningan	Rp 1,947,026,000	Rp 1,823,126,000	
	- Kab. Majalengka	Rp 2,005,218,000	Rp 1,873,218,000	
	- Kab. Pangandaran	Rp 909,794,000	Rp 844,894,000	
	- Kab. Purwakarta	Rp 1,454,190,000	Rp 1,363,574,000	
	- Kab. Subang	Rp 2,361,685,000	Rp 2,212,884,000	
	- Kab. Sukabumi	Rp 3,537,912,000	Rp 3,366,124,000	
	- Kab. Sumedang	Rp 1,843,832,000	Rp 1,728,149,000	
	- Kab. Tasikmalaya	Rp 2,623,911,000	Rp 2,459,286,000	
	- Kota Bandung	Rp 3,129,186,000	Rp 2,932,860,000	
	- Kota Banjar	Rp 616,694,000	Rp 576,694,000	
	- Kota Bekasi	Rp 2,914,208,000	Rp 2,745,016,000	
	- Kota Bogor	Rp 1,407,402,000	Rp 1,319,101,000	
	- Kota Cimahi	Rp 912,249,000	Rp 855,014,000	
	- Kota Cirebon	Rp 713,216,000	Rp 666,716,000	
	- Kota Depok	Rp 2,166,376,000	Rp 2,016,746,000	
	- Kota Sukabumi	Rp 759,641,000	Rp 711,681,000	
	- Kota Tasikmalaya	Rp 1,170,760,000	Rp 1,097,305,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a) Pembangunan Sarpras dalam			
	- Kab. Majalengka	Rp 1,200,000,000	Rp 100,000,000	

14.	PROVINSI JAWA TENGAH	Rp 83,094,273,000	Rp 73,914,808,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN			DITJEN BINA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis			
	- Kab. Boyolali	Rp 560,000,000	Rp 412,073,000	
	- Kab. Brebes	Rp 985,000,000	Rp 332,032,000	
	- Kab. Cilacap	Rp 970,000,000	Rp 305,770,000	
	- Kab. Grobogan	Rp 590,000,000	Rp 137,630,000	
	- Kab. Karanganyar	Rp 365,000,000	Rp 198,882,000	
	- Kab. Kendal	Rp 740,000,000	Rp 145,692,000	
	- Kab. Magelang	Rp 165,000,000	Rp 78,182,000	
	- Kab. Pemalang	Rp 825,000,000	Rp 315,320,000	
	- Kab. Semarang	Rp 610,000,000	Rp 471,445,000	
	- Kab. Sragen	Rp 690,000,000	Rp 186,275,000	
	- Kota Semarang	Rp 870,000,000	Rp 358,190,000	
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Banjarnegara	Rp 2,184,547,000	Rp 2,047,488,000	
	- Kab. Banyumas	Rp 3,020,604,000	Rp 2,867,104,000	
	- Kab. Batang	Rp 1,917,923,000	Rp 1,797,587,000	
	- Kab. Blora	Rp 2,045,600,000	Rp 1,941,600,000	
	- Kab. Boyolali	Rp 2,178,248,000	Rp 2,041,584,000	
	- Kab. Brebes	Rp 3,033,309,000	Rp 2,842,449,000	
	- Kab. Cilacap	Rp 3,067,672,000	Rp 2,875,113,000	
	- Kab. Demak	Rp 2,243,345,000	Rp 2,102,597,000	
	- Kab. Grobogan	Rp 2,605,327,000	Rp 2,437,019,000	
	- Kab. Jepara	Rp 2,314,264,000	Rp 2,169,067,000	
	- Kab. Karanganyar	Rp 2,050,062,000	Rp 1,920,916,000	
	- Kab. Kebumen	Rp 2,683,110,000	Rp 2,509,810,000	
	- Kab. Kendal	Rp 2,187,879,000	Rp 2,050,609,000	
	- Kab. Klaten	Rp 2,575,430,000	Rp 2,412,032,000	
	- Kab. Kudus	Rp 1,828,992,000	Rp 1,714,192,000	
	- Kab. Magelang	Rp 2,522,830,000	Rp 2,364,638,000	
	- Kab. Pati	Rp 2,477,800,000	Rp 2,313,815,000	
	- Kab. Pekalongan	Rp 2,132,650,000	Rp 1,995,578,000	
	- Kab. Pemalang	Rp 2,606,996,000	Rp 2,444,496,000	
	- Kab. Purbalingga	Rp 2,134,570,000	Rp 1,999,970,000	
	- Kab. Purworejo	Rp 1,888,166,000	Rp 1,769,702,000	
	- Kab. Rembang	Rp 1,753,675,000	Rp 1,643,646,000	
	- Kab. Semarang	Rp 2,208,561,000	Rp 2,068,561,000	
	- Kab. Sragen	Rp 2,157,532,000	Rp 2,021,532,000	
	- Kab. Sukoharjo	Rp 1,998,464,000	Rp 1,872,414,000	
	- Kab. Tegal	Rp 2,599,495,000	Rp 2,435,914,000	
	- Kab. Temanggung	Rp 1,986,017,000	Rp 1,836,017,000	
	- Kab. Wonogiri	Rp 2,365,412,000	Rp 2,216,612,000	
	- Kab. Wonosobo	Rp 2,000,808,000	Rp 1,875,277,000	
	- Kota Magelang	Rp 1,055,185,000	Rp 988,982,000	
	- Kota Pekalongan	Rp 1,248,711,000	Rp 1,170,361,000	
	- Kota Salatiga	Rp 1,163,444,000	Rp 1,088,444,000	
	- Kota Semarang	Rp 2,744,191,000	Rp 2,571,991,000	
	- Kota Surakarta	Rp 1,517,256,000	Rp 1,417,002,000	
	- Kota Tegal	Rp 1,226,198,000	Rp 1,149,198,000	

15	PROVINSI D.I YOGYAKARTA	Rp 9,915,298,000	Rp 7,345,638,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN			DITJEN BINA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis			
	- Kab. Bantul	Rp 1,470,000,000	Rp 544,218,000	
	- Kab. Gunung Kidul	Rp 910,000,000	Rp 356,260,000	
	- Kab. Kulon Progo	Rp 380,000,000	Rp 105,829,000	
	- Kab. Sleman	Rp 600,000,000	Rp 192,617,000	
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Bantul	Rp 1,467,906,000	Rp 1,375,791,000	
	- Kab. Gunung Kidul	Rp 1,392,118,000	Rp 1,304,723,000	
	- Kab. Kulon Progo	Rp 1,034,100,000	Rp 972,325,000	
	- Kab. Sleman	Rp 1,692,572,000	Rp 1,586,043,000	
	- Kota Yogyakarta	Rp 968,602,000	Rp 907,832,000	
16.	PROVINSI JAWA TIMUR	Rp 67,787,404,000	Rp 61,555,471,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN			DITJEN BINA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis			
	- Kab. Bangkalan	Rp 160,000,000	Rp -	
	- Kab. Blitar	Rp 820,000,000	Rp 289,661,000	
	- Kab. Bondowoso	Rp 640,000,000	Rp 125,969,000	
	- Kab. Jember	Rp 413,000,000	Rp 147,591,000	
	- Kab. Ngawi	Rp 490,000,000	Rp 253,286,000	
	- Kab. Probolinggo	Rp 270,000,000	Rp 78,949,000	
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Bangkalan	Rp 1,765,822,000	Rp 1,652,199,000	
	- Kab. Banyuwangi	Rp 2,414,660,000	Rp 2,271,660,000	
	- Kab. Blitar	Rp 1,918,240,000	Rp 1,798,840,000	
	- Kab. Bojonegoro	Rp 2,120,811,000	Rp 1,987,751,000	
	- Kab. Bondowoso	Rp 1,504,086,000	Rp 1,409,719,000	
	- Kab. Gresik	Rp 1,930,963,000	Rp 1,809,313,000	
	- Kab. Jember	Rp 3,461,849,000	Rp 3,290,349,000	
	- Kab. Jombang	Rp 2,076,524,000	Rp 1,946,243,000	
	- Kab. Kediri	Rp 2,326,785,000	Rp 2,156,803,000	
	- Kab. Lamongan	Rp 2,177,401,000	Rp 1,801,026,000	
	- Kab. Lumajang	Rp 1,848,203,000	Rp 1,731,453,000	
	- Kab. Madiun	Rp 1,369,902,000	Rp 1,283,952,000	
	- Kab. Magetan	Rp 1,379,796,000	Rp 1,290,946,000	
	- Kab. Malang	Rp 3,369,514,000	Rp 3,158,109,000	
	- Kab. Mojokerto	Rp 1,778,658,000	Rp 1,665,658,000	
	- Kab. Nganjuk	Rp 1,836,831,000	Rp 1,720,631,000	
	- Kab. Ngawi	Rp 1,605,986,000	Rp 1,505,226,000	
	- Kab. Pacitan	Rp 1,150,462,000	Rp 1,075,681,000	
	- Kab. Pamekasan	Rp 1,381,144,000	Rp 1,294,491,000	
	- Kab. Pasuruan	Rp 2,343,933,000	Rp 2,203,933,000	
	- Kab. Ponorogo	Rp 1,662,976,000	Rp 1,556,716,000	
	- Kab. Probolinggo	Rp 1,871,355,000	Rp 1,756,455,000	
	- Kab. Sampang	Rp 1,468,504,000	Rp 1,376,370,000	
	- Kab. Sidoarjo	Rp 2,440,194,000	Rp 2,287,119,000	
	- Kab. Situbondo	Rp 1,357,036,000	Rp 1,270,236,000	
	- Kab. Sumenep	Rp 1,958,925,000	Rp 1,836,021,000	

		- Kab. Trenggalek	Rp 1,353,718,000	Rp 1,268,785,000	
		- Kab. Tuban	Rp 1,865,443,000	Rp 1,746,865,000	
		- Kab. Tulungagung	Rp 1,819,843,000	Rp 1,658,915,000	
		- Kota Batu	Rp 656,340,000	Rp 615,162,000	
		- Kota Blitar	Rp 604,660,000	Rp 566,260,000	
		- Kota Kediri	Rp 709,527,000	Rp 664,297,000	
		- Kota Madiun	Rp 624,975,000	Rp 585,175,000	
		- Kota Malang	Rp 1,275,536,000	Rp 1,200,116,000	
		- Kota Mojokerto	Rp 531,404,000	Rp 498,604,000	
		- Kota Pasuruan	Rp 670,395,000	Rp 630,395,000	
		- Kota Probolinggo	Rp 715,507,000	Rp 670,827,000	
		- Kota Surabaya	Rp 3,646,496,000	Rp 3,417,714,000	
17.	PROVINSI BALI		Rp 8,958,088,000	Rp 8,127,045,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN				DITJEN BINA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan				
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis				
	- Kab. Karangasem	Rp 470,000,000	Rp 170,851,000		
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI				DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem				
	a) Penyelenggaraan Administrasi				
	- Kab. Badung	Rp 933,879,000	Rp 875,287,000		
	- Kab. Bangli	Rp 704,136,000	Rp 659,958,000		
	- Kab. Buleleng	Rp 1,316,433,000	Rp 1,232,404,000		
	- Kab. Gianyar	Rp 973,167,000	Rp 909,667,000		
	- Kab. Jembrana	Rp 801,719,000	Rp 750,119,000		
	- Kab. Karangasem	Rp 1,049,390,000	Rp 992,701,000		
	- Kab. Klungkung	Rp 663,983,000	Rp 619,083,000		
	- Kab. Tabanan	Rp 978,597,000	Rp 917,141,000		
	- Kota Denpasar	Rp 1,066,784,000	Rp 999,834,000		
18.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT		Rp 14,905,301,000	Rp 14,005,920,000	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI				DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem				
	a) Penyelenggaraan Administrasi				
	- Kab. Bengkayang	Rp 965,772,000	Rp 903,772,000		
	- Kab. Kapuas Hulu	Rp 967,832,000	Rp 895,232,000		
	- Kab. Kayong Utara	Rp 633,908,000	Rp 593,908,000		
	- Kab. Ketapang	Rp 1,273,732,000	Rp 1,191,732,000		
	- Kab. Kubu Raya	Rp 1,164,767,000	Rp 1,075,367,000		
	- Kab. Landak	Rp 1,026,146,000	Rp 961,765,000		
	- Kab. Melawi	Rp 817,408,000	Rp 763,808,000		
	- Kab. Mempawah	Rp 862,030,000	Rp 807,630,000		
	- Kab. Sambas	Rp 1,350,880,000	Rp 1,266,180,000		
	- Kab. Sanggau	Rp 1,101,380,000	Rp 1,031,480,000		
	- Kab. Sekadau	Rp 735,169,000	Rp 687,969,000		
	- Kab. Sintang	Rp 1,010,766,000	Rp 946,366,000		
	- Kota Pontianak	Rp 1,108,157,000	Rp 1,037,757,000		
	- Kota Singkawang	Rp 687,354,000	Rp 642,954,000		
	b. PROGRAM BINA ADMINISTRASI				DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan				
	a) Pengadaan Sarana Prasarana				
	- Kab. Sintang	Rp 1,200,000,000	Rp 1,200,000,000		

19.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Rp 11,067,911,000	Rp 10,430,778,000	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Barito Selatan	Rp 591,483,000	Rp 554,308,000	
	- Kab. Barito Timur	Rp 675,330,000	Rp 632,959,000	
	- Kab. Barito Utara	Rp 702,218,000	Rp 657,818,000	
	- Kab. Gunung Mas	Rp 733,527,000	Rp 687,527,000	
	- Kab. Kapuas	Rp 980,663,000	Rp 919,663,000	
	- Kab. Katingan	Rp 757,902,000	Rp 710,037,000	
	- Kab. Kotawaringin Barat	Rp 710,612,000	Rp 665,012,000	
	- Kab. Kotawaringin Timur	Rp 1,053,861,000	Rp 985,836,000	
	- Kab. Lamandau	Rp 606,993,000	Rp 568,911,000	
	- Kab. Murung Raya	Rp 671,121,000	Rp 628,826,000	
	- Kab. Pulang Pisau	Rp 659,208,000	Rp 617,208,000	
	- Kab. Seruyan	Rp 706,414,000	Rp 662,094,000	
	- Kab. Sukamara	Rp 542,875,000	Rp 507,875,000	
	- Kota Palangkaraya	Rp 675,704,000	Rp 632,704,000	
	b. PROGRAM BINA ADMINISTRASI			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan			
	a) Pembangunan Sarpras dalam			
	- Prov. Kalimantan Tengah	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000	
20.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Rp 11,485,687,000	Rp 10,775,061,000	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Balangan	Rp 667,943,000	Rp 626,036,000	
	- Kab. Banjar	Rp 1,261,588,000	Rp 1,182,435,000	
	- Kab. Barito Kuala	Rp 990,449,000	Rp 928,249,000	
	- Kab. Hulu Sungai Selatan	Rp 799,588,000	Rp 754,013,000	
	- Kab. Hulu Sungai Tengah	Rp 798,217,000	Rp 747,617,000	
	- Kab. Hulu Sungai Utara	Rp 793,870,000	Rp 743,870,000	
	- Kab. Kotabaru	Rp 1,031,081,000	Rp 966,390,000	
	- Kab. Tabalong	Rp 796,814,000	Rp 746,814,000	
	- Kab. Tanah Bumbu	Rp 886,063,000	Rp 831,063,000	
	- Kab. Tanah Laut	Rp 891,982,000	Rp 835,982,000	
	- Kab. Tapin	Rp 776,275,000	Rp 732,275,000	
	- Kota Banjar Baru	Rp 713,504,000	Rp 669,004,000	
	- Kota Banjarmasin	Rp 1,078,313,000	Rp 1,011,313,000	
21.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Rp 9,260,356,000	Rp 8,674,713,000	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Berau	Rp 805,096,000	Rp 754,296,000	
	- Kab. Kutai Barat	Rp 844,769,000	Rp 791,069,000	
	- Kab. Kutai Kertanegara	Rp 1,386,501,000	Rp 1,297,772,000	
	- Kab. Kutai Timur	Rp 1,142,359,000	Rp 1,066,759,000	
	- Kab. Mahakam Ulu	Rp 544,559,000	Rp 511,359,000	
	- Kab. Paser	Rp 837,110,000	Rp 784,589,000	
	- Kab. Penajam Paser Utara	Rp 662,681,000	Rp 621,104,000	
	- Kota Balikpapan	Rp 1,096,495,000	Rp 1,027,775,000	
	- Kota Bontang	Rp 650,193,000	Rp 609,397,000	
	- Kota Samarinda	Rp 1,290,593,000	Rp 1,210,593,000	



22.	PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp 19,726,665,000	Rp 17,660,940,000	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Bolaang Mongondow	Rp 910,269,000	Rp 852,617,000	
	- Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Rp 579,844,000	Rp 543,444,000	
	- Kab. Bolaang Mongondow Timur	Rp 597,205,000	Rp 559,405,000	
	- Kab. Bolaang Mongondow Utara	Rp 616,422,000	Rp 576,672,000	
	- Kab. Kepulauan Sangihe	Rp 768,910,000	Rp 720,669,000	
	- Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Rp 662,439,000	Rp 619,139,000	
	- Kab. Kepulauan Talaud	Rp 825,318,000	Rp 772,518,000	
	- Kab. Minahasa	Rp 1,174,333,000	Rp 1,100,655,000	
	- Kab. Minahasa Selatan	Rp 927,140,000	Rp 867,840,000	
	- Kab. Minahasa Tenggara	Rp 737,818,000	Rp 689,118,000	
	- Kab. Minahasa Utara	Rp 775,460,000	Rp 726,808,000	
	- Kota Bitung	Rp 741,026,000	Rp 694,426,000	
	- Kota Mobago	Rp 582,471,000	Rp 545,926,000	
	- Kota Manado	Rp 1,013,971,000	Rp 950,354,000	
	- Kota Tomohon	Rp 614,039,000	Rp 575,514,000	
	b. PROGRAM BINA ADMINISTRASI			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan			
	a) Pengadaan Sarana Prasarana			
	- Kab. Kepulauan Sangihe	Rp 2,200,000,000	Rp 2,200,000,000	
	- Kab. Kepulauan Talaud	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a) Pembangunan Sarpras dalam			
	- Kab. Bolaang Mongondow Utara	Rp 1,500,000,000	Rp 165,835,000	
	- Kab. Kepulauan Sangihe	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000	
	- Kab. Kepulauan Talaud	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000	
23.	PROVINSI GORONTALO	Rp 9,043,310,000	Rp 7,594,082,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN			DITJEN BINA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis			
	- Kab. Boalemo	Rp 780,000,000	Rp 528,416,000	
	- Kab. Bone Bolango	Rp 880,000,000	Rp 683,909,000	
	- Kab. Gorontalo	Rp 775,000,000	Rp 304,475,000	
	- Kab. Gorontalo Utara	Rp 830,000,000	Rp 599,350,000	
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Boalemo	Rp 673,316,000	Rp 631,072,000	
	- Kab. Bone Bolango	Rp 856,257,000	Rp 802,157,000	
	- Kab. Gorontalo	Rp 1,114,335,000	Rp 1,044,335,000	
	- Kab. Gorontalo Utara	Rp 714,675,000	Rp 669,741,000	
	- Kab. Pohuwato	Rp 725,716,000	Rp 680,116,000	
	- Kota Gorontalo	Rp 694,011,000	Rp 650,511,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a) Pembangunan Sarpras dalam			
	- Prov. Gorontalo	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000	

24.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp 13,987,510,000	Rp 12,116,998,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN			DITJEN BINA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis			
	- Kab. Donggala	Rp 670,000,000	Rp 368,380,000	
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Banggai	Rp 1,120,469,000	Rp 1,044,969,000	
	- Kab. Banggai Kepulauan	Rp 738,222,000	Rp 689,522,000	
	- Kab. Banggai Laut	Rp 607,780,000	Rp 569,680,000	
	- Kab. Buol	Rp 746,756,000	Rp 698,056,000	
	- Kab. Donggala	Rp 977,225,000	Rp 914,825,000	
	- Kab. Morowali	Rp 714,588,000	Rp 669,754,000	
	- Kab. Morowali Utara	Rp 687,568,000	Rp 644,068,000	
	- Kab. Parigi Moutong	Rp 1,244,669,000	Rp 1,166,269,000	
	- Kab. Poso	Rp 927,092,000	Rp 868,892,000	
	- Kab. Sigi	Rp 911,923,000	Rp 852,223,000	
	- Kab. Tojo Una-Una	Rp 727,868,000	Rp 680,868,000	
	- Kab. Toli-Toli	Rp 759,325,000	Rp 713,683,000	
	- Kota Palu	Rp 854,025,000	Rp 800,443,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a) Pembangunan Sarpras dalam			
	- Kab. Donggala	Rp 1,000,000,000	Rp 135,366,000	
	- Kab. Toli-Toli	Rp 1,300,000,000	Rp 1,300,000,000	
25.	PROVINSI SULAWESI BARAT	Rp 8,385,805,000	Rp 7,738,112,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN			DITJEN BINA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis			
	- Kab. Majene	Rp 1,040,000,000	Rp 716,107,000	
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Majene	Rp 686,829,000	Rp 643,129,000	
	- Kab. Mamasa	Rp 872,370,000	Rp 815,570,000	
	- Kab. Mamuju	Rp 837,259,000	Rp 783,659,000	
	- Kab. Mamuju Tengah	Rp 658,947,000	Rp 615,347,000	
	- Kab. Mamuju Utara	Rp 779,009,000	Rp 730,309,000	
	- Kab. Polewali Mandar	Rp 1,211,391,000	Rp 1,133,991,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a) Pembangunan Sarpras dalam			
	- Kab. Mamasa	Rp 1,300,000,000	Rp 1,300,000,000	
	- Kab. Polewali Mandar	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000	
26.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Rp 13,918,693,000	Rp 12,629,964,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN			DITJEN BINA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis			
	- Kab. Muna	Rp 590,000,000	Rp 263,730,000	
	- Kab. Muna Barat	Rp 400,000,000	Rp 265,950,000	
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			

	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Bombana	Rp 893,637,000	Rp 837,547,000	
	- Kab. Buton	Rp 646,559,000	Rp 605,559,000	
	- Kab. Buton Utara	Rp 579,413,000	Rp 542,818,000	
	- Kab. Buton Selatan	Rp 626,407,000	Rp 587,207,000	
	- Kab. Buton Tengah	Rp 646,622,000	Rp 605,622,000	
	- Kab. Kolaka	Rp 895,585,000	Rp 839,885,000	
	- Kab. Kolaka Timur	Rp 726,013,000	Rp 680,213,000	
	- Kab. Kolaka Utara	Rp 787,395,000	Rp 737,993,000	
	- Kab. Konawe	Rp 1,037,349,000	Rp 964,749,000	
	- Kab. Konawe Kepulauan	Rp 566,513,000	Rp 531,313,000	
	- Kab. Konawe Selatan	Rp 1,081,991,000	Rp 1,013,991,000	
	- Kab. Konawe Utara	Rp 643,161,000	Rp 599,861,000	
	- Kab. Muna	Rp 950,433,000	Rp 889,333,000	
	- Kab. Muna Barat	Rp 671,160,000	Rp 628,060,000	
	- Kab. Wakatobi	Rp 657,185,000	Rp 614,385,000	
	- Kota Bau-Bau	Rp 664,987,000	Rp 623,265,000	
	- Kota Kendari	Rp 854,283,000	Rp 798,483,000	
27.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	<u>Rp 31,336,201,000</u>	<u>Rp 28,897,372,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN			DITJEN BINA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis			
	- Kab. Bone	Rp 930,000,000	Rp 733,138,000	
	- Kab. Bulukumba	Rp 1,125,000,000	Rp 900,420,000	
	- Kab. Maros	Rp 274,000,000	Rp -	
	- Kab. Pinrang	Rp 1,150,000,000	Rp 941,164,000	
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Bantaeng	Rp 704,337,000	Rp 660,144,000	
	- Kab. Barru	Rp 705,990,000	Rp 660,650,000	
	- Kab. Bone	Rp 1,681,490,000	Rp 1,570,953,000	
	- Kab. Bulukumba	Rp 1,031,961,000	Rp 967,126,000	
	- Kab. Enrekang	Rp 851,044,000	Rp 799,349,000	
	- Kab. Gowa	Rp 1,464,686,000	Rp 1,372,791,000	
	- Kab. Jeneponto	Rp 1,017,106,000	Rp 953,292,000	
	- Kab. Kep. Selayar	Rp 731,972,000	Rp 686,048,000	
	- Kab. Luwu	Rp 1,150,598,000	Rp 1,078,455,000	
	- Kab. Luwu Timur	Rp 894,636,000	Rp 835,236,000	
	- Kab. Luwu Utara	Rp 981,086,000	Rp 919,532,000	
	- Kab. Maros	Rp 1,051,278,000	Rp 983,978,000	
	- Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Rp 951,856,000	Rp 891,756,000	
	- Kab. Pinrang	Rp 1,033,564,000	Rp 965,708,000	
	- Kab. Sidenreng Rappang	Rp 910,222,000	Rp 853,047,000	
	- Kab. Sinjai	Rp 782,258,000	Rp 732,958,000	
	- Kab. Soppeng	Rp 803,133,000	Rp 752,883,000	
	- Kab. Takalar	Rp 854,351,000	Rp 799,251,000	
	- Kab. Tana Toraja	Rp 964,005,000	Rp 899,305,000	
	- Kab. Toraja Utara	Rp 984,009,000	Rp 922,272,000	
	- Kab. Wajo	Rp 1,133,840,000	Rp 1,062,659,000	
	- Kota Makassar	Rp 2,241,889,000	Rp 2,099,689,000	
	- Kota Palopo	Rp 706,439,000	Rp 662,117,000	
	- Kota Parepare	Rp 625,451,000	Rp 593,451,000	

	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a) Pembangunan Sarpras dalam			
	- Prov. Sulawesi Selatan	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000	
	- Kab. Soppeng	Rp 1,300,000,000	Rp 1,300,000,000	
	- Kab. Takalar	Rp 1,300,000,000	Rp 1,300,000,000	
28.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	<u>Rp 11,047,747,000</u>	<u>Rp 10,380,355,000</u>	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Bima	Rp 1,181,871,000	Rp 1,104,271,000	
	- Kab. Dompu	Rp 759,300,000	Rp 731,191,000	
	- Kab. Lombok Barat	Rp 1,300,285,000	Rp 1,218,689,000	
	- Kab. Lombok Tengah	Rp 1,634,008,000	Rp 1,531,490,000	
	- Kab. Lombok Timur	Rp 1,987,637,000	Rp 1,863,772,000	
	- Kab. Lombok Utara	Rp 729,939,000	Rp 684,139,000	
	- Kab. Sumbawa	Rp 1,266,221,000	Rp 1,186,778,000	
	- Kab. Sumbawa Barat	Rp 680,320,000	Rp 637,635,000	
	- Kota Bima	Rp 639,479,000	Rp 599,358,000	
	- Kota Mataram	Rp 868,687,000	Rp 823,032,000	
29.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	<u>Rp 25,160,229,000</u>	<u>Rp 23,540,981,000</u>	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Alor	Rp 930,058,000	Rp 870,758,000	
	- Kab. Belu	Rp 799,861,000	Rp 751,161,000	
	- Kab. Ende	Rp 1,002,371,000	Rp 943,071,000	
	- Kab. Flores Timur	Rp 973,283,000	Rp 911,483,000	
	- Kab. Kupang	Rp 1,171,349,000	Rp 1,096,049,000	
	- Kab. Lembata	Rp 733,540,000	Rp 687,140,000	
	- Kab. Malaka	Rp 834,269,000	Rp 779,769,000	
	- Kab. Manggarai	Rp 889,510,000	Rp 840,610,000	
	- Kab. Manggarai Barat	Rp 870,647,000	Rp 814,847,000	
	- Kab. Manggarai Timur	Rp 851,875,000	Rp 798,213,000	
	- Kab. Nagekeo	Rp 729,752,000	Rp 684,752,000	
	- Kab. Ngada	Rp 808,477,000	Rp 757,753,000	
	- Kab. Rote Ndao	Rp 757,063,000	Rp 707,963,000	
	- Kab. Sabu Raijua	Rp 646,466,000	Rp 605,066,000	
	- Kab. Sika	Rp 1,107,193,000	Rp 1,037,093,000	
	- Kab. Sumba Barat	Rp 698,001,000	Rp 653,501,000	
	- Kab. Sumba Barat Daya	Rp 936,898,000	Rp 877,498,000	
	- Kab. Sumba Tengah	Rp 623,015,000	Rp 582,315,000	
	- Kab. Sumba Timur	Rp 972,195,000	Rp 913,995,000	
	- Kab. Timor Tengah Selatan	Rp 1,422,552,000	Rp 1,333,272,000	
	- Kab. Timor Tengah Utara	Rp 1,084,443,000	Rp 1,019,743,000	
	- Kota Kupang	Rp 917,411,000	Rp 861,311,000	
	b. PROGRAM BINA ADMINISTRASI			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan			
	a) Pengadaan Sarana Prasarana			
	- Kab. Belu	Rp 1,100,000,000	Rp 1,100,000,000	
	- Kab. Rote Ndao	Rp 1,500,000,000	Rp 1,113,618,000	
	- Kab. Timor Tengah Utara	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			

	a) Pembangunan Sarpras dalam			
	- Kab. Manggarai Timur	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000	
30.	PROVINSI MALUKU	<u>Rp 12,873,857,000</u>	<u>Rp 12,212,838,000</u>	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Buru	Rp 927,008,000	Rp 868,333,000	
	- Kab. Buru Selatan	Rp 766,072,000	Rp 718,008,000	
	- Kab. Kepulauan Aru	Rp 900,269,000	Rp 843,269,000	
	- Kab. Maluku Barat Daya	Rp 1,051,339,000	Rp 984,839,000	
	- Kab. Maluku Tengah	Rp 1,357,440,000	Rp 1,271,903,000	
	- Kab. Maluku Tenggara	Rp 951,068,000	Rp 891,068,000	
	- Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp 835,317,000	Rp 782,697,000	
	- Kab. Seram Bagian Barat	Rp 1,037,579,000	Rp 971,379,000	
	- Kab. Seram Bagian Timur	Rp 1,065,096,000	Rp 997,096,000	
	- Kota Ambon	Rp 915,239,000	Rp 857,816,000	
	- Kota Tual	Rp 667,430,000	Rp 626,430,000	
	b. PROGRAM BINA ADMINISTRASI			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan			
	a) Pengadaan Sarana Prasarana			
	- Kab. Kepulauan Aru	Rp 1,200,000,000	Rp 1,200,000,000	
	- Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp 1,200,000,000	Rp 1,200,000,000	
31.	PROVINSI MALUKU UTARA	<u>Rp 12,070,472,000</u>	<u>Rp 11,469,138,000</u>	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Halmahera Barat	Rp 891,459,000	Rp 835,359,000	
	- Kab. Halmahera Selatan	Rp 1,557,299,000	Rp 1,459,299,000	
	- Kab. Halmahera Tengah	Rp 785,591,000	Rp 736,303,000	
	- Kab. Halmahera Timur	Rp 878,401,000	Rp 822,401,000	
	- Kab. Halmahera Utara	Rp 1,092,998,000	Rp 1,023,798,000	
	- Kab. Kepulauan Sula	Rp 1,110,151,000	Rp 1,040,441,000	
	- Kab. Pulau Morotai	Rp 719,467,000	Rp 670,467,000	
	- Kab. Pulau Taliabu	Rp 787,986,000	Rp 737,986,000	
	- Kota Ternate	Rp 803,936,000	Rp 752,836,000	
	- Kota Tidore Kepulauan	Rp 843,184,000	Rp 790,248,000	
	b. PROGRAM BINA ADMINISTRASI			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan			
	a) Pengadaan Sarana Prasarana			
	- Kab. Pulau Morotai	Rp 1,200,000,000	Rp 1,200,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			
	a) Pembangunan Sarpras dalam			
	- Kab. Halmahera Barat	Rp 1,400,000,000	Rp 1,400,000,000	
32.	PROVINSI PAPUA	<u>Rp 38,556,696,000</u>	<u>Rp 35,527,669,000</u>	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN			DITJEN BINA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis			
	- Kab. Merauke	Rp 960,000,000	Rp 180,801,000	
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN DUKCAPIL
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Asmat	Rp 1,264,879,000	Rp 1,185,439,000	

	- Kab. Biak Numfor	Rp 1,163,440,000	Rp 1,090,262,000	
	- Kab. Boven Digul	Rp 1,241,607,000	Rp 1,164,607,000	
	- Kab. Deiyai	Rp 832,244,000	Rp 779,244,000	
	- Kab. Dogiyai	Rp 1,035,925,000	Rp 970,925,000	
	- Kab. Intan Jaya	Rp 902,192,000	Rp 845,192,000	
	- Kab. Jayapura	Rp 1,323,872,000	Rp 1,239,972,000	
	- Kab. Jayawijaya	Rp 1,842,322,000	Rp 1,723,822,000	
	- Kab. Keerom	Rp 897,627,000	Rp 838,627,000	
	- Kab. Kep. Yapen	Rp 965,850,000	Rp 904,550,000	
	- Kab. Lanny Jaya	Rp 1,619,426,000	Rp 1,517,526,000	
	- Kab. Mamberamo Raya	Rp 924,593,000	Rp 862,893,000	
	- Kab. Mamberamo Tengah	Rp 829,996,000	Rp 777,996,000	
	- Kab. Mappi	Rp 1,158,156,000	Rp 1,081,656,000	
	- Kab. Merauke	Rp 1,268,289,000	Rp 1,188,716,000	
	- Kab. Mimika	Rp 1,226,028,000	Rp 1,149,528,000	
	- Kab. Nabire	Rp 1,080,138,000	Rp 1,012,371,000	
	- Kab. Nduga	Rp 1,606,456,000	Rp 1,505,556,000	
	- Kab. Paniai	Rp 1,365,900,000	Rp 1,276,300,000	
	- Kab. Pegunungan Bintang	Rp 1,659,934,000	Rp 1,555,634,000	
	- Kab. Puncak	Rp 1,029,601,000	Rp 964,301,000	
	- Kab. Puncak Jaya	Rp 1,085,607,000	Rp 1,015,607,000	
	- Kab. Sarmi	Rp 953,430,000	Rp 893,430,000	
	- Kab. Supiori	Rp 806,498,000	Rp 755,498,000	
	- Kab. Tolikara	Rp 2,101,103,000	Rp 1,966,403,000	
	- Kab. Waropen	Rp 975,318,000	Rp 914,126,000	
	- Kab. Yakuimo	Rp 2,318,775,000	Rp 2,170,575,000	
	- Kab. Yalimo	Rp 899,359,000	Rp 841,859,000	
	- Kota Jayapura	Rp 1,018,131,000	Rp 954,253,000	
	c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI			DITJEN
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan			BINA ADWIL
	a) Pembangunan Sarpras dalam			
	- Kab. Sarmi	Rp 2,200,000,000	Rp 2,200,000,000	
33.	PROVINSI PAPUA BARAT	<u>Rp 13,479,673,000</u>	<u>Rp 12,604,029,000</u>	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			DUKCAPIL
	a) Penyelenggaraan Administrasi			
	- Kab. Fakfak	Rp 833,097,000	Rp 780,813,000	
	- Kab. Kaimana	Rp 873,789,000	Rp 814,289,000	
	- Kab. Manokwari	Rp 934,101,000	Rp 872,401,000	
	- Kab. Manokwari Selatan	Rp 816,224,000	Rp 765,014,000	
	- Kab. Maybrat	Rp 1,294,277,000	Rp 1,212,977,000	
	- Kab. Pegunungan Arfak	Rp 929,449,000	Rp 866,949,000	
	- Kab. Raja Ampat	Rp 1,326,735,000	Rp 1,235,935,000	
	- Kab. Sorong	Rp 1,230,689,000	Rp 1,151,889,000	
	- Kab. Sorong Selatan	Rp 1,034,974,000	Rp 969,174,000	
	- Kab. Tambrau	Rp 973,261,000	Rp 912,061,000	
	- Kab. Teluk Bintuni	Rp 1,340,556,000	Rp 1,249,556,000	
	- Kab. Teluk Wondama	Rp 1,018,326,000	Rp 953,526,000	
	- Kota Sorong	Rp 874,195,000	Rp 819,445,000	
34.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	<u>Rp 5,758,508,000</u>	<u>Rp 4,659,899,000</u>	
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI			DITJEN
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem			DUKCAPIL
	a) Penyelenggaraan Administrasi			

	-	Kab. Bulungan	Rp 734,871,000	Rp 688,765,000	
	-	Kab. Malinau	Rp 743,951,000	Rp 697,251,000	
	-	Kab. Nunukan	Rp 802,833,000	Rp 751,933,000	
	-	Kab. Tanah Tidung	Rp 537,651,000	Rp 503,651,000	
	-	Kota Tarakan	Rp 639,202,000	Rp 599,098,000	
b.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI				DITJEN
1)	Kegiatan Pembinaan dan				BINA ADWIL
a)	Pengadaan Sarana Prasarana				
	-	Kab. Nunukan	Rp 2,300,000,000	Rp 1,419,201,000	
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,					
TJAHJO KUMOLO					